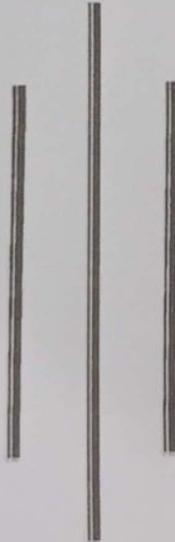




**PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG :  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**



LURAH MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MURTIGADING  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH MURTIGADING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) TA. 2024 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING  
 dan  
 LURAH MURTIGADING

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.850.746.159,-
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp. 5.353.520.674,-</u>
	Surplus/Defisit	(Rp. 502.774.515,-)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 602.774.515,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 502.774.515,-
	Sisa (lebih/kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah Kalurahan dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di Murtigading  
pada tanggal 29 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING, KAPANEWON SANDEN,  
KABUPATEN BANTUL (26/MURTIGADING/2023)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MURTIGADING  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	248.090.838,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.595.455.321,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.850.746.159,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.560.492.544,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.001.001.139,00	
5.3.	Belanja Modal	718.412.991,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.614.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.353.520.674,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(502.774.515,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	602.774.515,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	602.774.515,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>502.774.515,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Bantul, 2 January 2024

Bambang Trijanto, M.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MURTI GADING  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	248.090.838,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.595.455.321,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.850.746.159,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.526.594.587,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.825.103.096,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	856.323.720,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	856.323.720,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.452.624,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.452.624,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	236.156.052,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.156.052,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	82.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.007.000,00	DLL, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.007.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.903.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.903.500,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	67.833.000,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	67.833.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	36.900.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	34.440.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	34.440.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	201.607.200,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	201.607.200,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	187.980.000,00	ADD, PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	187.980.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>57.000.681,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.000.681,00	DLL, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.300.681,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	41.000.000,00	DDS, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>103.184.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	89.624.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.624.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.300.000,00	DLL, PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.260.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.260.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>226.570.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.050.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	49.853.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.853.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.225.000,00	PAD
1.4.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.885.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	24.345.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.1.	Belanja Pegawai	7.020.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.325.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.355.000,00	PAD
1.4.06	5.1.	Belanja Pegawai	9.360.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.495.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	81.262.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.572.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	47.690.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	18.590.500,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.590.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.844.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.844.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	3.395.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
1.4.95		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	6.155.000,00	DDS
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.155.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>314.736.310,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.396.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.396.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	4.455.000,00	DDS, PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.455.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	249.885.310,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	249.885.310,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.133.420.440,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>162.547.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	76.250.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.250.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	69.110.000,00	DDS, PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.110.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17.187.000,00	PBK
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.187.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>638.017.440,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.965.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.965.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	449.174.900,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.174.900,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.127.540,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.127.540,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	56.950.000,00	DDS, PBK
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.950.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	4.800.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>510.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	310.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.700.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	129.300.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.175.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	39.825.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.175.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	29.825.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>269.800.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	229.800.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.800.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	40.000.000,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	39.825.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>494.021.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	14.836.500,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.836.500,00	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	362.937.000,00	PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.937.000,00	
2.5.93		Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	116.247.500,00	DDS, PBK
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.197.500,00	
2.5.93	5.3.	Belanja Modal	88.050.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>55.012.000,00</b>	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	55.012.000,00	DDS, PBK
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	35.012.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>4.023.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.023.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.023.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>415.977.900,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>86.103.400,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	16.125.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.125.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	16.175.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.175.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	29.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1.910.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	15.068.400,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.068.400,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	5.325.000,00	DDS
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>195.432.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	21.600.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	100.656.000,00	DDS, DLL, PAD, F
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.656.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	61.031.000,00	DDS, PAD
3.2.90	5.1.	Belanja Pegawai	3.736.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.295.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	12.145.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.145.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>47.902.500,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	37.150.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.150.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.752.500,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.752.500,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>86.540.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.515.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.515.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	31.375.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.975.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
3.4.92		Fasilitas Kegiatan Gotong Royong	40.650.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.650.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>203.913.747,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>97.208.060,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	27.208.060,00	DDS, PBK
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.208.060,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>19.855.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.855.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.855.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>86.850.687,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	61.985.687,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.985.687,00	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	24.865.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.865.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>73.614.000,00</b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>6.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	6.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>67.614.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	67.614.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.614.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.353.520.674,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(502.774.515,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	602.774.515,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>502.774.515,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Bantul, 2 January 2024

Lurah

MURTI GADING

Des Bambang Trijanto, M.Pd